

KEMITRAAN SEKOLAH-MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SAMPANG, JAWA TIMUR

Syamsul Arifin

Staf Pengajar Pendidikan Agama Islam Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang
Email: syamsarifin@yahoo.com

ABSTRACT

This study was conducted in Sampang, Madura. Selection of Sampang as research sites based on the following considerations: first, people's access to education, especially at the junior and senior levels are low. If using a benchmark Enrollment (APM), the number of graduates SD / MI who do not attend school to SMP / MTs as much as 78%. While people's access to education at the secondary level (high school) is only 11.43%. Second, in addition to lower people's access to education, especially on SMP / MTs and SMA / SMK / MA, education in Sampang also faces a gap between the quantity, namely the development of the number of quality educational institutions with its performance. Third, the next problem faced by education in Sampang is low community participation in education. Based on these considerations, this study aims to: (1) determine the main cause of poor people's access to education, especially at the junior and senior high level; (2) determine the main causes of low participation of the educational community; (3) obtain a picture of the performance of the School Committee and Board of Education are not conducive to the improvement of community involvement in education; (4) describe the profile and involvement of the community in responding to the educational problems; (5) defines citizenship in a community partnership to improve access and participation in developing the quality of education. This study used a qualitative approach to data collection techniques as follows: (1) the interview; (2) observation; (3) documentary; (4) FGD. The data obtained with these techniques will then be analyzed through the following steps: (1) data reduction; (2) a data display; (3) conclusion drawing / verifying.

Keywords: Partnership, participation, quality of education.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sampang, lokasi penelitian ini, merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Pulau Madura. Selain Kabupaten Sampang, di Madura terdapat tiga kabupaten lainnya, yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Di dibandingkan dengan wilayah lainnya di Jawa Timur, statistik perkembangan di Sampang tidak begitu menggemblakan. Hal ini, antara lain, dapat dicermati dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sampang yang tergolong paling rendah apabila dibandingkan dengan wilayah lainnya

Rendahnya IPM di Sampang tampaknya berkaitan perkembangan pendidikan di tempat tersebut yang juga belum begitu menggemblakan. Secara umum perkembangan pendidikan di Sampang dihadapkan pada persoalan klasik pendidikan di tanah air. Salah satu permasalahan pendidikan di Sampang yang penting diperhatikan adalah akses masyarakat terhadap pendidikan yang terlihat pada Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Dari data yang diperoleh dari Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang diperoleh gambaran sebagai berikut: **pertama**, akses

masyarakat terhadap sekolah dasar (SD/MI) cukup baik. Dari data APM, yakni perbandingan antara jumlah anak usia sekolah SD/MI (7-12 tahun) dengan yang sekolah mencapai 99,10%. Sedangkan yang tidak memiliki akses ke sekolah dasar hanya 0,9%. Bahkan kalau dilihat APK SD/MI (115,87%) pencapaian keberhasilan pendidikan di tingkat SD/MI melampaui target. **Kedua**, rendahnya transisi dari SD/MI ke SMP/MTs. Jika menggunakan patokan APM, jumlah tamatan SD/MI yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs sebanyak 78%. Hal ini berarti akses masyarakat terhadap SMP/MTs sangat rendah. **Ketiga**, akses masyarakat Sampang terhadap pendidikan semakin rendah pada jenjang pendidikan menengah. Seperti pada tabel 3 tersebut, APM tingkat SMA/SMK/MA hanya 11,43%, sedangkan APK hanya 14,81%. Berdasarkan data dari: <http://pdankjatim.net>, yang memuat profil Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur, APK SMP/MTs di Sampang berada pada tingkat paling bawah bersama dengan Bondowoso. Sedangkan APK tertinggi di capai kota Madiun dengan APK sebesar 112,75%.

Selain rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan terutama pada jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, pendidikan di Sampang juga dihadapkan pada masalah kesenjangan antara kuantitas, yakni perkembangan jumlah lembaga pendidikan dengan kualitas performansinya. Berdasarkan informasi dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampang, perkembangan kelembagaan pendidikan di Sampang tergolong fantastik. Sampai pada 2005/2006, jumlah lembaga pendidikan dari jenjang TK sampai SLTA berjumlah 1381. Jumlah SD/MI menempati posisi teratas, yakni sebanyak 1060. Di posisi kedua ditempati SMP/MTs sebanyak 159 sekolah. TK menempati urutan ketiga, yakni 117 sekolah. Sedangkan SMU/MA menempati posisi keempat. Jumlah sekolah pada jenjang ini sebanyak 43. Di Sampang juga terdapat 2 SLB (Sekolah Luar

Biasa) dan 1 sekolah kejuruan (SMK). Tetapi perkembangan dari sisi kelembagaan tersebut, tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas. Dari penelitian pendahuan (*preliminary research*), kami mendengar lontaran ketidakpuasaan dari masyarakat terhadap kualitas pendidikan di Sampang. Yang paling banyak mendapat sorotan masyarakat adalah disparitas antara lembaga pendidikan yang terletak di perkotaan dengan pedesaan. Disparitas tidak hanya pada kualitas gedung sekolah, tetapi yang tidak kalah memprihatinkan adalah, kualitas guru dan rasio jumlah guru dengan murid. Salah seorang pemerhati pendidikan Sampang, Ketua DP, bahkan menuturkan tentang adanya alumni madrasah ibtidaiyah (MI) yang juga mengajar (guru) di MI.

Masalah berikutnya yang dihadapi oleh pendidikan di Sampang adalah rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Partisipasi yang dimaksud adalah seperti dikemukakan oleh Faisal (2007) yang menekankan pada dua hal penting, yaitu: **pertama**, partisipasi sebagai suatu gerakan masyarakat (*social movement*). Kemudian yang **kedua** adalah, partisipasi sebagai praktik sosial yang membudaya dan berkelanjutan. Dengan kedua cakupan makna tersebut, maka partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tidak cukup diwujudkan hanya dalam aktivitas parsial seperti sekedar membayar sumbangan pendidikan, tetapi merupakan aktivitas yang berkesinambungan dan terlembaga untuk mengontrol terhadap seluruh proses pendidikan agar berjalan sesuai dengan standar mutu pendidikan. Dalam bentuk formal, di Sampang, sebagaimana juga di tempat-tempatnya lainnya, juga terdapat Komite Sekolah (KS) pada tiap-tiap satuan pendidikan, dan Dewan Pendidikan (DP), yang terikat pada fungsi normatifnya sebagai berikut: yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*). Tetapi fungsi ini belum berjalan optimal di

Sampang. Menurut informasi yang kami peroleh dari beberapa tokoh masyarakat, fungsi yang dilakukan oleh KS, baru sebatas melaksanakan pertemuan di awal tahun ajaran baru yang lebih banyak membicarakan kebutuhan sekolah dalam meningkatkan fasilitas pendidikannya. DP juga belum berfungsi optimal karena menghadapi kendali konsolidasi antaranggota yang masih lemah.

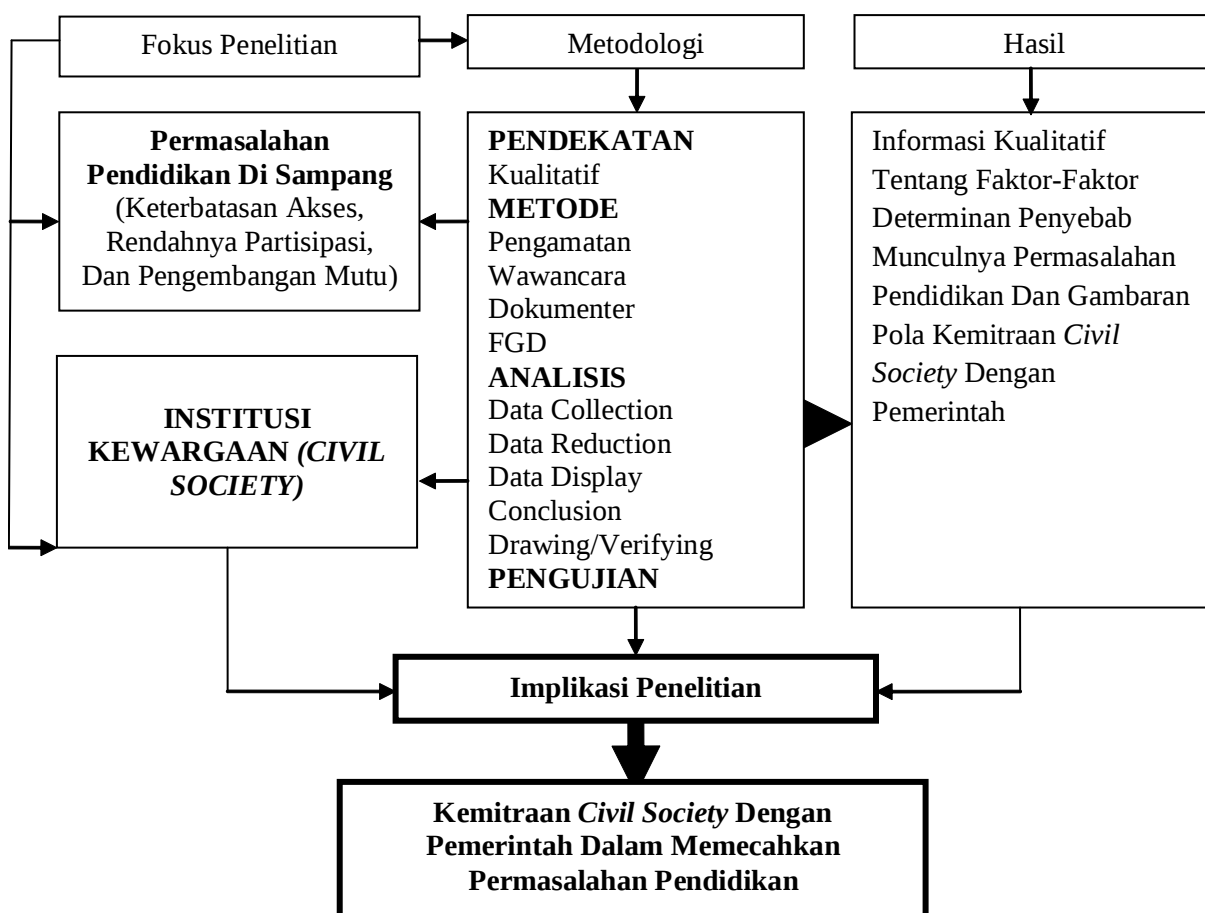
Dengan mempertimbangkan adanya tiga persoalan krusial tersebut, penelitian ini akan memfokuskan pada kajian tentang kemitraan kemitraan masyarakat dan sekolah dalam mengembangkan mutu pendidikan di Sampang.

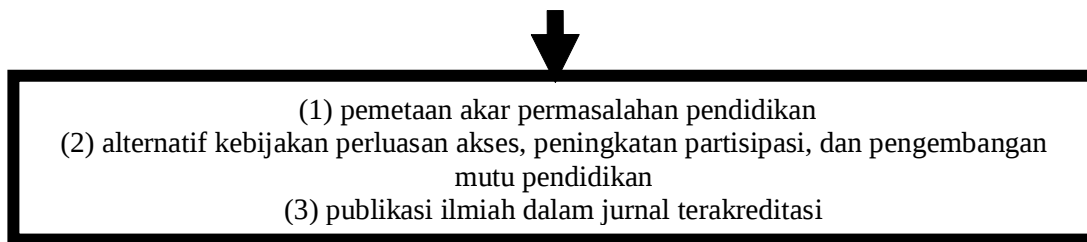
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif juga ditekankan adanya pengujian terhadap data yang diperoleh sehingga hasil penelitian bisa

dipercaya. Penelitian ini juga menggunakan prosedur pengujian keabsahan data yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut (Nasution, 1996): (1) Memperpanjang masa observasi; (2) Melakukan triangulasi. Data yang diperoleh melalui metode dan sumber tertentu dibandingkan dengan metode dan sumber yang lain; (3) Mengadakan *member check*. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen, peneliti konfirmasi kembali dengan informan; (4) Melakukan *peer debriefing*. Peneliti mengadakan diskusi dengan kolega peneliti di Universitas Muhammadiyah Malang.

Berdasarkan penjelasan metode penelitian di atas, berikut ini akan digambarkan secara skematis proses penelitian kemitraan institusi kewargaan (*civil society*) dalam meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat sebagai upaya pengembangan mutu pendidikan di Kabupaten Sampang Madura.





Gambar 1. Tahapan Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Pendidikan: Antara Formalitas dan Tuntutan Publik

Perubahan pengelolaan pendidik, dari pola yang sentralistik, ke pola desentralistik, sebenarnya mulai di Sampang. Setidaknya hal tersebut di tandai dengan berdirinya Dewan Pendidikan (DP) pada tahun 2003. Isntitusi ini, kalau menggunakan ungkapan Ketua DP Sampang, di maksudkan sebagai wadah formal peran serta masyarakat di bidang pendidikan. Tetapi fungsi ini nampaknya belum dijalankan secara optimal oleh DP. Ada kesan, bahkan muncul dari anggota DP sendiri, keberandaan DP masih bersifat formalitas karena sekedar memenuhi tuntutan keputusan menteri pendidikan nasional Nomor : 004/U/2002 tentang Dewan pendidikan dan Komite Sekolah. Keputusan ini antara lain berisi ketentuan bahwa di setiap kabupaten/kota perlu dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/ kota kesan formalitas tidak hanya berkaitan dengan keputusan menteri tersebut. Menurut penuturan Ketua DP, pembentukan Dp juga ada kaitannya dengan dana *block grant* sehingga inisiatif pendirian DP berawal dari pemerintah berikut penuturan Ketua DP:

“Pendirian DP pada mulanya merupakan inisiatif dari pemerintah (*top down*). Oleh karena itu, kesan formalitas terhadap pendirian DP lebih menonjol. Pemerintah membentuk DP karena di tuntutan oleh sebuah persyaratan untuk memperoleh block grant. Jadi sifatnya formalitas”.

Sebagai ketua, Ketua DP memiliki harapan agar DP bisa menjalankan fungsi seperti ketentuan dalam buku, *panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah*. Ia kemudian menyebut empat peran yang diinginkan dari DP yang dipimpinnya, yaitu : **advisor** pemerintah (eksekutif); **motivator** masyarakat agar berperan aktif dalam pendidikan; **evaluator** terhadap setiap penyimpangan di bidang pembangunan pendidikan baik yang dilaksanakan pemerintah, maupun masyarakat; **mediator** anatar eksekutif dan legislatif dalam menentukan kebijakan pembangunan pendidikan di kabupaten Sampang. Ketua DP juga punya harapan, di masa depan DP bisa memiliki *operation room* pendidikan yang bisa diakses oleh senua masyarakat sampan, terutama yang memiliki masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Tetapi peran ini menurut pengakuan Ketua DP lebih memfokuskan pada apa yang ia sebut dengan pembinaannya internal, seperti; membebani kinerja DP; membina peran komite sekolah; mengembangkan hubungan harmonis dengan setor terkait.

Ketidak puasan terhadap peran DP, diakui juga oleh anggota DP dari unsur LSM, Wagir menurut Wagir, sementara ini peran yang dilakukan DP masih bersifat *ad hoc* dan kasuistik, belum memiliki rancangan besar untuk menata pendidikan di Sampang yang ia nilai banyak dengan masalah seperti keterbatasan dan kualifikasi guru, transparansi penerimaan siswa baru, pungutan biaya pendidikan, dll. Seharusnya menurut wasil, DP memiliki rancangan yang utuh DP menurut wager juga perlu

memikirkan PERDA Pendidikan untuk mengatur pelaksanaan pendidikan di Sampang.

Pada tingkat akar rumput, penelitian menjumpai berbagai keluhan yang berkaitan dengan persoalan pendidikan, masalah ini tentu sangat diharapkan oleh masyarakat bisa diselesaikan. Beberapa informan yang ditemui ada yang tidak tahu kalau sejak tiga tahun terakhir di Sampang telah muncul lembaga baru yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Mereka pada umumnya masih menyebut BP3 sebagai lembaga perwakilan orang tua. Keluhan yang banyak disampaikan oleh masyarakat adalah pengutan yang dilakukan oleh sekolah dan tentu dirasakan memberikan. Keluhan ini misalnya diungkap oleh salah seorang wali murid SMPN 1 Supardi: “Sekolah tak mu tahu dengan kondisi ekonomi orang tua, beli buku ini, beli buku itu. Setiap anak yang diterima dikenakan uang gedung. Kalau uang gedung ditiadakan, namanya diganti dengan uang pembelian AC. Daftar ulang juga bayar. Kita orang kecil kepada siapa bicara. Sementara saya ingin menyekolahkan anak . kok pendidikan sekarang kayak kayak kembali ke zaman Belanda. Partekelir!. Padahal negeri . **orang kene’ enga engko’ , magi la konyyah ta’ kera egubris**. Katanya sekarang zaman reformasi. Tapi beban biaya pendidikan kok lebih berat. Buku lama tidak dipakai lagi. Belinya ke sekolah. Setengah didagangkan. Padahal isinya Cuma di ubah – ubah kata – kata”.

Supriadi tidak tahu sekarang di Sampang telah ada DP dan KS sebagai lembaga yang bisa menampung keluhannya. Dia malah mengatakan: “ *La pada bai* (sama saja). Dulu ada BP3. Sekarang ada KS”. Apa yang dikeluhkan oleh Supriadi sebenarnya telah lama menjadi perhatian Irfan, seorang aktivis pada sebuah LSM di Sampang. Dalam penilaian Irfan, praktik pendidikan di Sampang sudah lama dijangkiti kepentingan bisnis. Salah satu praktis bisnis yang mendapat perhatian Irfan adalah bisnis buku di sekolah – sekolah

padahal, menurut Irfan, buku harus diberikan secara gratis kepada murid bukan diperjual belikan.

“Buku paket harus diberikan secara gratis. Tapi pada kenyataannya, buku – buku paket itu seolah – olah jadi pasar, menjadi bisnis di persekolahan kalau di Sampang kota, semua SD baik kurang dalam, Rongtengah, Dalpenang, Gunung sekar, banyuanyar, Polag semuanya menjadikan buku paket sebagai ajang bisnis. Di jual langsung kepada murid. Murid seolah – olah dipaksa beli buku. Mestinya tidak boleh dijual belikan. Hal seperti ini sudah berlangsung sangat lama, meskipun saya seringkali menggedor kepada bupati maupun kepada kepala Dinas P&k. tetapi keadaan seperti dibiarkan. Pemberian ini telah berlangsung sehingga bisnis sekolah itu merajalela. Coba bayangkan, abak kelas I rata – rata harus mempunyai 5 buku yang harganya sekitar 15.000 sampai 17.500. kelas II 7-8 buku. Ironisnya kalau, misalnya, adiknya menggunakan buku itu. Tidak boleh. Itu di SD lingkungan SMP juga begitu. Bahkan lebih gila lagi. Di SMA juga lebih gila lagi. Pengadaan buku – buku paket itu sebenarnya tanggung jawab negara. Bukan tanggung jawab masyarakat. Seharusnya negara yang cukup untuk mencetak buku sebanyak – banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah kan sudah tahu, bahwa masyarakat Madura, terutama Sampang, termasuk salah kantong kemiskinan terbesar di seluruh Indonesia”.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, keberadaan DP belum optimal karena fungsi normatif DP sebagaimana ketentuan dalam buku, *panduan Umum Dewan pendidikan dan komite sekolah*, belum dijalankan. Ada kesan keberadaan DP, tidak optimalnya DP anatara lain karena DP sedang berada masa transisi. Ketua DP sekarang, Ketua DP, hanya menggantikan ketua lama yang meninggal dunia. Sementara posisi Ketua DP sendiri blum begitu kuat di hadapkan anggota Dp lainnya.

Komite Sekolah: Kasus SMPN 3 dan SMP Islam Darus Syahid

Gambaran partisipasi masyarakat di tingkat sekolah dalam penelitian ini diperoleh dari satu sekolah negeri dan satu swasta, yakni: SMPN 3 dan SMP Islam Darus Syahid. Pemilihan kedua situs ini dipilih secara *purposive* berdasarkan pertimbangan dari kepala Dinas P&K Kabupaten Sampang Moh. Sjahid. Menurut informasi sari Moh. Sjahid, kedua sekolah tersebut memiliki karakteristik yang unik. Di kota Sampang terdapat empat SMPN. Dalam penilaian Moh. Sjahid mutu pendidikan di SMPN 3 belum setara dengan SMPN 1 dan SMPN 2. Rendahnya mutu pendidikan di SMPN 3 nampaknya memberikan pengaruh terhadap animo masyarakat. Sekolah ini selalu dijadikan pilihan terakhir setelah SMPN 1 dan SMPN 2. Akibatnya SMPN 3 di hadapkan dengan kualitas *input* yang rendah. Menurut informasi dari kepala sekolah SMPN 3. Pada tahun ajaran 2005/2006, ada 17 siswa yang kesulitan baca tulis.

Sedangkan SMP Islam Darus Syahid dinilai oleh Moh. Sjahid sebagai sekolah swasta yang memperlihatkan perkembangan cukup pesat terutama dalam kualitas dan prestasi akademik. Dalam hal partisipasi masyarakat (orang tua) di kedua sekolah itu, dalam gambaran Moh. Sjahid, juga memiliki perbedaan yang unik. SMPN 3 menghadapi kendala dalam mengalah partisipasi orang tua. Sedangkan di SMP Islam Darus Syahid, terdapat fenomena yang unik karena sejak awal pendirian berpusat pada K.H. Fachrur Rozy. Kyai inilah yang mendirikan dan mengembangkan SMP Islam Darus Syahid sejak dari nol. Dengan demikian. Manajemen sekolah ini bisa dikelompokkan sebagai pendidikan berbasis masyarakat (*community-based Education*) penggunaan konsep ini untuk mengelompokkan SMP Islam Darus Syahid bukan semata – mata karena mempertimbangkan status kepemilikan yang

memang berpusat pada kyai, melainkan juga karena SMP Islam Darus Syahid kreatif dalam mengembangkan kurikulum sehingga memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan sekolah lainnya di samping. Pendiri sekolah ini. K.H. Fachrur Rozy. Adalah alumni pondok pesantren Modern Gontor. Pada mulanya ia kurang begitu tertarik mendirikan lembaga pendidikan. Tetapi setelah dinasehati oleh gurunya dari Gontor, ia kemudian merintis lembaga selanjutnya, K.H Fachrur Rozy, mengembangkan sekolah formal, SMP Islam Darus Syahid. Pengalaman pendidikannya selama di Gontor rupanya menjadi inspirasi dalam mengembangkan kurikulum pendidikan. Sebagaimana kurikulum di Gontor, SMP Islam Darus Syahid, memiliki keunggulan dalam pendidikan bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena memang sejak awal mandiri, SMP Islam Darus Syahid seperti dalam ungkapan K.H. Fachrur Rozy, tidak mau merepotkan orang tua, terutama dari segi pembiayaan. Dari segi pendanaan SMP Islam Darus Syahid relatif mengalami masalah karena K.H Fachrur Rozy memiliki bisnis keluarga dalam bidang jual beli emas. Pendanaan pendidikan di SMP Islam Darus Syahid hampir seluruhnya berasal dari bisnis emas ini.

Sebenarnya dari kepala sekolah sangat mengingunkan orang tua bisa dilibatkan dalam aktivitas pendidikan di SMP Islam Darus Syahid karena dari pihak kyai tidak berkenan, sampai saat ini SMP Islam Darus Syahid belum memiliki wadah sebagai pelembagaan partisipasi orang tua.

Meskipun keberadaan SMP Islam Darus Syahid diuntungkan dengan posisi K.H Fachrur Rozy dan dukungan bisnis keluarga, tidak berarti sekolah sepi dari masalah. Salah satu masalah yang dihadapi oleh SMP Islam Darus Syahid adalah manajemen yang terkesan adanya dualisme kepemimpinan antara K.H Fachrur Rozy sebagai “pemilik” sekolah dengan kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses

pendidikan di SMP Islam Darus Syahid. Di pihak, kepala sekolah merasa mendapatkan otonomi karena diberi keleluasaan dalam mengatur proses belajar mengajar. Tetapi di pihak lain, kepala sekolah tidak memiliki wewenang dalam mengatur keuangan. Berikut penuturan Zainal Fatah, kepala Sekolah SMP Islam Darus Syahid:

“Kalau masalah manakemen persekolahan, penuh diserahkan kepada kepala sekolah. Bagaimana pengiriman siswa, dan bagaimana kegiatan sekolah, semuanya di serahkan kepada saya. Cuma ada satu yang tidak boleh dikerjakan oleh kepala sekolah, yaitu manajemen keuangan. Ini yang paling fatal bagi saya. Jadi manajemen sarana – prasarana, itu semuanya diatur oleh kepala sekolah. Hak penuh kepala sekolah. Tidak ada intervensi dari kyai. Amu saya apakan, haknya kepala sekolah. Tetapi satu, manajemen pendidikan manajemen itu kan terdiri dari manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, termasuk manajemen keuangan. Nah manajemen terakhir itu saya tidak pernah tahu. Bagaimana saya seharusnya menyusun RAPBS. Saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah buat”.

Kepala sekolah merasa tidak tahu menahu terhadap *cash flow* keuangan sekolah. Tetapi sejak adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang juga di terima oleh SMP Islam Darus Syahid. Kepala sekolah merasa memiliki otoritas penuh karena sebagai pihak yang mengambil BOS dan adanya ketentuan dalam buku. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama, bahwa dana BOS harus di simpan dalam rekening

sekolah dan masuk dalam pos penerimaan di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)

“Cuma dengan adanya BOS, meskipun dari pihak kyai tetap berkeinginan menggunakan pola tetapi karena saya mempunyai tanggung jawab secara nasional, secara kedinasan, saya tidak mau ambil pusing. Jadi kalau uang itu oleh kyai dimintai pertanggung jawaban, maka SPD-nya saya minta tanyakan kepda guru, tanyakan kepada siswa, sebab penggunaan BOS itu bukan hanya untuk guru, tetapi juga siswa, yang menjadi tujuan saya adalah pemenuhan buku, di samping honor guru”

Dari pihak sekolah keberadaan KS- sebagai wadah baru pengganti BP3- diharapkan bisa ikut memberikan solusi terhadap dapat permasalahan yang dihadapi oleh SMPN 3. Ks juga di harapkan dapat mendukung program mendukung program SMPN 3. Menurut penuturan kepala sekolah, SMPN 3 menghadapi permasalahan yang cukup kompleks dalam tiga hal. Pertama, permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Dalam KBM ini, SMPN 3 menghadapi kelemahan sebagai berikut: [i] terbatasnya jumlah guru terutama guru mata pelajaran [ii] terbatasnya buku pegangan guru dan murid; [iii] rendahnya kedisiplinan guru dalam mengajar; [iv] guru kurang antusias dalam meningkatkan hasil belajar siswa.

Permasalahan kedua yang dihadapi oleh SMPN 3 berkaitan dengan fasilitas sekolah. Dalam bidang ini, SMPN 3 menghadapi masalah sebagai berikut: [i] fasilitas labotarium terbatas; [ii] terbatasnya alat peraga untuk setiap mata pelajaran.

Sedangkan permasalahan ketiga berkaitan dengan partisipasi orang tua. Secara umum partisipasi orang tua terhadap sekolah menurut penilaian kepala sekolah sangat rendah Kepala sekolah menghubungkan

rendahnya partisipasi dengan kondisi perekonomian orang tua.

“Partisipasi orang tua di SMPN III Sampang tergolong rendah. Permasalahannya adalah ekonomi orang tua sangat rendah. Data perekonomian orang tua murid – murid SMPN III banyak yang menjadi tukang becak sehingga saya sebagai kepala sekolah betul – betul susah untuk menggalang partisipasi dari wali murid. Mengingat kondisi perekonomian orang tua yang seperti itu, saya hanya memungut iuran komite hanya lima ribu untuk siswa pada tiap bulannya”.

Bagaimana peran KS dalam menggalang partisipasi orang tua keberadaan KS tidak mengubah pola partisipasi masyarakat yang cenderung pasif terhadap sekolah. Tetapi tidak berarti KS tidak melakukan aktivitas untuk menggalang partisipasi orang tua. Menurut informasi K.H. Mu’tasim, KS melakukan pertemuan dengan orang tua murid paling tidak dua kali dalam setahun, yakni pada saat penerimaan siswa baru dan menjelang pelaksanaan UAN.

Dalam pandangan K.H. Mu’tasim, posisi KS tidak berbeda dengan BP3. Hanya saja, KS memiliki kelebihan dibandingkan dengan BP3 karena KS-dalam ungkapan K.H Mu’tasim- “ bisa melakukan peran ke dalam” K.H. Mu’tasim mengibaratkan KS dengan sekolah seperti pasangan suami isteri. Atau dengan DPRD dengan bupati. Berikut pernyataan K.H. Mu’tasim;

“Jadi, tiap – tiap bertindak, sekolah itu rapat dengan kira. Contoh kecil seperti ketika sekolah menghadapi UAN. Kita mencari jalan keluar bagaimana caranya agar murid – murid bisa meningkat prestasinya. Jauh – jauh sebelumnya kita mengumpulkan para wali murid untuk memberikan pengertian yang

tujuannya agar wali murid ikut mendorong putra – puterinya belajar”.

K.H. Mu’tasim sangat sadar terhadap kondisi perekonomian orang tua murid SMPN3. Kondisi ini disadari oleh K.H. Mu’tasim berpengaruh terhadap pola partisipasi orang tua terhadap sekolah. Meskipun begitu, K.H. Mu’tasim tidak segan-segan memberikan pengertian kepada orang tua murid agar berpartisipasi dalam kegiatan sekolah paling tidak dalam bentuk pemberian sumbangan rutin. Cara yang dilakukan K.H. Mu’tasim dengan menggunakan pendekatan keagamaan seperti penuturan berikut ini:

“Kalau sampeyan itu mau membiayai anak, meskipun pekerjaan sampeyan itu yang dicari hanya satu piring, tetapi sampeyan jangan khawatir, kalau sampeyan mau membiayai anak sampeyan, Insya Allah ada rezekinya Saya juga mengkaitkan dengan semangat mencari ilmu (tolabul ilmi). Misalnya saya mengambil hadist agar umat Islam mencari ilmu sampai ke negeri Cina. Saya bilang kepada mereka, untung sampeyan itu tidak ke Cina, cukup disini. Jadi yang saya tekankan adalah semangat mencari ilmu. Saya tegaskan kepada orang tua murid bahwa jika sampeyan membiayai anak-anak sampeyan. Insya Allah, saya tidak tahu, sampeyan tidak tahu, di kasih rezeki oleh Allah bihatsu la yahtasib”.

Selain itu *tolabul ilmi* yang ditekankan oleh K.H. Mu’tasim, menurut penuturan H. Fudoli, juga ditekankan semangat beramal.

“Dalam setiap forum musyawarah dengan orang tua, K.H. Mu’tasim sering menyisipkan pesan-pesan keagamaan seperti semangat beramal. K.H. Mu’tasim selalu menegaskan bahwa beramal bukan hanya membangun masjid saja,

tetapi juga pendidikan, demi masa depan bangsa, negara. Khususnya demi masa depan anak-anak kita”.

Dengan cara seperti itu, menurut penuturan H. Fudoli, kesadaran orang tua tergugah untuk partisipasi terhadap sekolah meskipun secara ekonomi mengalami kesulitan. Berkat partisipasi orang tua, sekolah mendapatkan. Tetapi H. Fudoli menegaskan, keberadaan K.H. Mu'tasin tidak secara sepihak menggugah kesadaran orang tua. Musyawarah tetap mekanisme yang paling utama dalam menggerakkan partisipasi orang tua. Hal yang menarik dari pemaparan H. Fudoli, meskipun ketua KS seorang kyai yang memiliki kedudukan khas dikalangan masyarakat Madura, musyawarah tetap dilaksanakan secara demokratis. Berikut penuturan H. Dudoli:

“Musyawarah yang dilaksanakan dengan orang tua, kadang-kadang sampai “pailit!” Sampai setengah hari untuk mencapai mufakat. Banyak yang interupsi, seperti rapat para anggota DPR, meskipun ada kyai. Orang tua itu kan juga ingin tidak dibeban dalam menyekolahkan anaknya ke SMPN 3”.

Lesson Learned

Tuntutan reformasi yang mengiringi perubahan politik di tanah air semenjak 1998 memperoleh respons yang cukup konstruktif dari dunia pendidikan. Meskipun sejumlah kelemahan tetap mewarnai pendidikan nasional seperti yang banyak dilontarkan banyak ahli dan pengamat, ada perubahan fundamental yang bergulir semenjak 2003, yakni demokratisasi pendidikan. Demokratisasi mendapatkan tempat yang kuat dalam pendidikan setelah pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam bab III pasal 4 ayat 1 UU

No. 20 tahun 2003 dinyatakan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Pada ayat 6 dalam bab dan pasal yang sama dikemukakan: *Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan*”. Kemudian pada 9 terdapat ketentuan sebagai berikut: “Musyawarah berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”. Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang sistem pendidikan nasional ini memiliki implikasi sebagai berikut: pertama, pemerintah melakukan reposisi dari pemegang tunggal kebijakan pendidikan yang dikenal dengan pola sentralistik ke pola desentralistik. Kedua, sebagai kelanjutan reposisi dari pihak pemerintah, maka masyarakat memiliki peluang besar terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebelum munculnya UU No. 20 tahun 2003, sebenarnya telah Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Melalui kedua institusi ini masyarakat dapat melakukan peran dalam empat hal, yaitu: pertama, memberikan pertimbangan (*advisory*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Kedua, memberikan dukungan (*supporting*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Ketiga, melakukan kontrol (*controlling*) agar pendidikan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab. Keempat, menjadi mediator antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Reformasi di bidang pendidikan yang ditandai dengan lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga bergulir di salah satu kabupaten di

Madura, yaitu Sampang. Bagian ini ingin me-review kembali realitas partisipasi masyarakat di Sampang. Dari review ini selanjutnya akan dimunculkan pelajaran yang bisa diambil untuk mengembangkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

Perkembangan pendidikan di Sampang di satu sisi sebenarnya mencatat “prestasi” yang menggembirakan. Secara kelembagaan, pendidikan di Sampang berkembang cukup pesat. Menurut data Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sampang, pada tahun 2004/2005, di Sampang terdapat 1.381 lembaga pendidikan dari jenjang TK sampai SLTA. Data ini tidak termasuk pesantren dan perguruan tinggi. Sedangkan jumlah murid yang ditampung pada semua jenjang pendidikan di Sampang sebanyak 216.655 murid. Dari seluruh jumlah murid tersebut sebagian besar terserap pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

Khusus pada jenjang sekolah dasar, Sampang mencatat prestasi yang menggembirakan karena akses masyarakat hampir mencapai 100%. Bahkan kalau dilihat dari APK, akses masyarakat terhadap sekolah dasar melampaui 100%. Pada saat ini, Sampang sebagaimana dituturkan oleh Moh. Sjahid, Kepala Dinas pada jenjang SLTP (SMT/MTs). Dibandingkan dengan jenjang sekolah di bawahnya, akses masyarakat pada jenjang SLTP belum menggembirakan karena baru mencapai APK sebesar 42,35%. Kalau menggunakan patokan APM, baru mencapai 21,10%.

Di balik prestasi pada level kelembagaan, ada sejumlah kritik terhadap perkembangan pendidikan di Sampang. Kritik yang sering dikemukakan oleh banyak informan adalah ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Perkembangan yang cukup pesat di level kelembagaan ternyata tidak diimbangi dengan upaya peningkatan mutu sehingga muncul persoalan disparitas baik antara lembaga pendidikan maupun antar wilayah. Disparitas antara lembaga pendidikan terjadi di kota seperti yang terjadi

pada jenjang pendidikan SLTP. Seperti dikemukakan pada bab I, di Sampang terdapat tiga SMPN, yaitu SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 3. Menurut penilaian *stake holders* baik dari pemerintah maupun masyarakat, sekolah yang dipandang paling bermutu adalah SMPN 1, dan SMPN 2. Sedangkan SMPN 3 selalu dijadikan pilihan terakhir. Disparitas berikutnya terjadi antar wilayah kota dan desa. Pendidikan di pedesaan Sampang menurut beberapa informan banyak yang menyedihkan. Yang paling banyak mendapatkan sorotan adalah keterbatasan fasilitas terutama yang berkaitan dengan sumber-sumber belajar dan guru. Dengan keterbatasan fasilitas, pendidikan di kawasan pedesaan berjalan apa adanya.

Bagaimana dengan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan? Secara formal-kelembagaan, di Sampang terdapat Dewan Pendidikan sebagai wadah pelembagaan partisipasi masyarakat di tingkat Kabupaten. Lembaga ini berdiri pada tahun 2003. Komite Sekolah yang mewadahi partisipasi masyarakat pada tingkat sekolah juga berdiri seperti di SMPN 3. Di sekolah ini Komite Sekolah berdiri pada tahun 2003. Meskipun Sampang telah memiliki lembaga formal untuk mewadahi partisipasi masyarakat, dalam kenyataannya wujud partisipasi masyarakat belum berada pada titik yang ideal, sebagaimana ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002.

Bisa dikatakan, meskipun di Sampang telah berdiri Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan tergolong rendah. Ada banyak faktor sebagai penyebab rendahnya partisipasi masyarakat tersebut. Pertama, faktor internal. Faktor ini berkaitan dengan kondisi keorganisasian lembaga tersebut. Yang menarik dicermati keberadaan Dewan Pendidikan. Di awal-awal pendiriannya, menurut peraturan Solahur Rabbanim salah seorang anggota Dewan Pendidikan, Dewan Pendidikan Sampang telah menjalankan fungsi

pengawasan antara lain terhadap program BKM (Bantuan Khusus Murid), BKG (Bantuan Khusus Guru), dan pengawasan terhadap pelaksanaan PSB (Penerimaan Siswa Baru). Tetapi program Dewan Pendidikan mengalami keterputusan setelah ketuanya, Masyhuri, meninggal dunia di awal tahun 2005. Sejak meninggalnya Masyhuri, kepemimpinan Dewan Pendidikan Sampang beralih ke Ketua DP yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua. Peralihan kepemimpinan ini rupanya memberikan pengaruh terhadap kinerja Dewan Pendidikan.

Pasca kepemimpinan Masyhuri, menurut penilaian beberapa anggota Dewan pendidikan mengalami penurunan. Dalam penilaian beberapa informan, turunnya kinerja Dewan Pendidikan.

Pasca kepemimpinan Masyhuri, menurut penilaian beberapa anggota Dewan Pendidikan mengalami penurunan. Dalam penilaian beberapa informan, turunnya kinerja Dewan Pendidikan disebabkan oleh legalitas kepemimpinan Ketua DP, keterbatasan fasilitas seperti perkantoran, dan lemahnya konsolidasi pengurus Dewan Pendidikan. Sejak menggantikan Masyhuri, Ketua DP belum mendapatkan SK definitif dari lembaga terkait. Status kepemimpinan Ketua DP di Dewan Pendidikan sebatas sebagai pejabat sementara (Pjs) yang dikukuhkan oleh pengurus yang lain. Sedangkan SK definitifnya belum diterima. Kondisi ini diakui oleh beberapa informan agak menyulitkan Ketua DP untuk mengambil kebijakan strategis. Apabila Ketua DP juga belum mendapatkan dukungan fasilitas yang memadai terutama perkantoran. Sebenarnya Dewan Pendidikan Sampang telah memiliki kantor yang cukup representatif di Jl. Jamaluddin yang berdekatan dengan Kantor Pemerintah Kabupaten Sampang. Kantor ini disewa dari keluarga Masyhuri, mantan ketua Dewan Pendidikan. Tetapi setelah meninggalnya Masyhuri, kantor tersebut diambil alih oleh keluarga Masyhuri sehingga

Dewan Pendidikan tidak memiliki kantor tetap.

Faktor kedua yang menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan rendah adalah kondisi obyektif masyarakat Sampang. Secara umum kondisi masyarakat Sampang seperti dipaparkan pada tabel 1 dan 2 merupakan masyarakat yang tertinggal baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi perkembangan pendidikan. Sampang merupakan salah satu kantong kemiskinan tidak saja di Jawa Timur, melainkan juga di Indonesia. Di dibandingkan dengan daerah lainnya di Madura, Sampang tidak memiliki kelayakan alam yang bisa diandalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan kondisi topografis yang rendah dari permukaan laut, serta curah hujan yang rendah pula menyebabkan lahan pertanian di Sampang tidak subur. Kondisi alam yang demikian menjadi salah satu faktor berkembangnya kemiskinan di Sampang.

Dalam konteks pendidikan, kemiskinan menjadi salah satu kendala bagi peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Keadaan seperti ini dirasakan setidaknya di SMPN 3. Seperti telah dijelaskan, di SMPN 3 telah berdiri Komite Sekolah sejak tahun 2003. Sebagaimana halnya keberadaan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah juga dimaksudkan sebagai wadah pelembagaan besar orang tua murid SMPN 3 berlatar belakang ekonomi rendah, pengurus Komite Sekolah maupun dari pihak sekolah sendiri menghadapi kesulitan untuk meningkatkan partisipasi orang tua terhadap sekolah. Dari pihak sekolah sebenarnya mempunyai harapan agar orang tua tidak sekedar menyekolahkan anaknya ke SMPN 3, melainkan juga menaruh perhatian setidaknya terhadap perkembangan prestasi anaknya. Bagi sekolah, perhatian orang tua terhadap prestasi anak dinilai sebagai bentuk partisipasi minimal. Sebenarnya sekolah mengharapkan bentuk partisipasi yang lain, bukan sekedar partisipasi minimal. Kepada peneliti, Abdullah Jamal, Kepala Sekolah SMON 3, secara lugas

menuturkan partisipasi yang dimaksud, yakni kontribusi finansial. Tetapi karena alasan rendahnya pendapatan orang tua, partisipasi tersebut tidak bisa diwujudkan. Rendahnya pendapatan orang tua ternyata tidak hanya berpengaruh pada kemampuan orang tua dalam memberikan kontribusi finansial, juga berpengaruh juga pada cara orang tua dalam menyingkapi sekolah. Ada beberapa orang tua yang mengeluhkan pungutan di SMPN 3, meskipun tidak begitu besar, dan dari pihak sekolah bersikap hati-hati dalam melakukan pungutan kepada orang tua. Sebelum penerimaan BOS, SMPN 3 memang melakukan pungutan yang meliputi uang seragam, uang pendaftaran, biaya pemeliharaan buku, dan iuran bulanan (SPP). Bagi orang tua yang kurang mampu, pungutan tersebut dianggap memberatkan. Meskipun demikian, yang menarik, orang tua tetap membayar dengan cara mencicil. Bahkan, menariknya lagi, ada orang tua yang menganggap pungutan tersebut tidak berat meskipun tergolong berpendapatan rendah, seperti penuturan Misbahah yang sehari-harinya berjualan minuman setelah suaminya meninggal dunia delapan tahun yang lalu.

“Ta’ berra! Ja anak kaula epasakola. Anak kaula agaduan kapenteran. Sala kaula la budu. Daddi kaula ikhlas sanajjan kaula majer kalaban nyecel (Saya tidak keberatan, karena anak saya disekolahkan. Anak saya memiliki kepandaian. Biar yang bodoh cukup saya. Jadi, saya ikhlas membayar, meskipun dengan cara menyicil)”.

Mengapa orang tua (miskin) tetap membayar semua pungutan dari SMPN 3? Di samping karena dianggap sebagai kewajiban, kesadaran orang tua tidak bisa dilepaskan dari peran Komite Sekolah terutama peran yang dilakukan oleh ketuanya, K.H. Mu’tasin. K.H. Mu’tasin cukup lama terlibat dalam kegiatan pendidikan di SMPN 3. Sebelum menjadi Ketua Komite Sekolah, K.H. Mu’tasin cukup lama menjadi ketua BP3. Posisi sosial K.H. Mu’tasin sebagai seorang kyai, di samping sekolah tokoh politik

(sekarang sebagai anggota DPRD Kabupaten Sampang dari fraksi PPP) rupanya menjadi daya tarik sehingga selalu dipilih menjadi ketua baik di BP3 maupun di Komite Sekolah. Figur kyai memang dibutuhkan di SMPN 3 untuk menggugah kesadaran orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah. K.H. Mu’tasin nampaknya cukup berhasil melakukan peran tersebut, sehingga orang tua memiliki kesadaran berpartisipasi (secara minimal) meskipun memiliki pendapatan yang rendah. Seperti telah dikemukakan pada pembahasan kondisi obyektif masyarakat Sampang, secara sosio-kultural masyarakat Sampang memiliki ketaatan kepada figur kyai. Kyai dalam sistem sosio-kultur masyarakat Madura sebagaimana juga yang berkembang di Sampang, merupakan salah satu golongan yang mendapatkan penghormatan selain bapak, ibu, dan pemimpin. Dengan sistem sosio-kultural semacam ini, K.H. Mu’tasin relatif mudah menggugah kesadaran orang tua semacam ini, K.H. Mu’tasin relatif mudah menggugah kesadaran orang tua. Pendekatan yang digunakan oleh K.H. Mu’tasin adalah pendekatan keagamaan.

Ada dua konsep penting yang sering digunakan oleh K.H. Mu’tasin, yaitu: semangat mencari ilmu (*toilabul ilmu*), ed an semangat beramal. Melalui konsep *tolabul ilmi*, K.H. Mu’tasin menyadarkan orang tua tentang arti pentingnya mencari ilmu sebagai salah satu doktrin terpenting dalam Islam. Dengan mendukung anak dalam mencari ilmu (*tolabul ilmi*), berarti orang tua telah melaksanakan kewajiban agama. K.H. Mu’tasin juga menggugah kesadaran orang tua melalui konsep amal. Dalam pandangan K.H. Mu’tasin sebagaimana yang sering disampaikan kepada orang tua, beramal bukan hanya menyumbang kegiatan keagamaan seperti sumbangan masjid, tetapi juga menyumbang kegiatan sekolah karena ada kaitannya dengan perintah mencari ilmu. Melalui pendekatan keagamaan ini, terbukti orang tua tergugah kesadarannya membantu

kegiatan sekolah meskipun tidak didukung pendapatan ekonomi yang tinggi. Pendekatan yang dilakukan oleh K.H. Mu'tasin memberikan pelajaran yang cukup berharga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan terutama dalam masyarakat yang memiliki kemiripan dengan masyarakat di sekitar SMPN 3.

Meskipun tetap memiliki keterbatasan karena alasan ekonomi, bentuk partisipasi orang tua murid SMPN 3 bila ditempatkan dalam kajian teoritik Dean Nielsen (2001), termasuk dalam kategori pemberian dukungan (*support*), sebagai kategori partisipasi yang paling sederhana. Selain pemberian dukungan (*support*), Dean Nielsen menyebut tiga kategori lainnya, yakni: keterlibatan (*involvement*)- orang tua dan anggota masyarakat lainnya terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan, misalnya dalam penyusunan jadwal sekolah atau kegiatan ekstra kurikuler; kemitraan (*partnership*) – orang tua dan anggota masyarakat lainnya menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah dalam menentukan hal-hal yang berkenaan dengan, misalnya tujuan program, alokasi dana, dan ketenagaan; kepemilikan penuh (*full ownership*) – para anggota masyarakat mengendalikan semua keputusan tentang program. Jika dilihat dari kajian teoritik Dean Nielsen tersebut, sekali lagi karena alasan keterbatasan ekonomi, maka terdapat ketimpangan partisipasi antara masyarakat di satu pihak, dengan pemerintah (sekolah) di pihak lain. Dalam konteks ini, masyarakat hanya berpartisipasi dalam bentuk pemberian dukungan (*support*) dari segi pendanaan, sedangkan rancangan kegiatan sekolah terutama yang bersifat akademik diserahkan kepada sekolah.

Kondisi yang terjadi di SMPN 3 tidak berada jauh dengan yang terjadi SMP Islam Darus Syahid. Artinya, keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan pendidikan di SMP Islam Darus Syahid bisa dikatakan “nihil”. Sejak awal, pendiri SMP Islam Darus

Syahid, K.H. Fachrur Rozy, memang tidak berinisiatif membuka peluang orang tua terlibat dalam kegiatan pendidikan. Alasan yang digunakan K.H. Fachrur Rozy karena tidak ingin merepotkan orang tua. Maka tidak heran jika di SMP Islam Darus Syahid belum memiliki wadah pelembagaan partisipasi orang tua semacam Komite Sekolah. Bagaimana dengan dukungan dana? SMP Islam Darus Syahid memang memungut sumbangan dari orang tua. Tetapi sumbangan ini seperti dituturkan sendiri oleh K.H. Fachrur Rozy belum mencukupi untuk menutupi seluruh biaya operasional sekolah yang lumayan besar. Jika kemudian SMP Islam Darus Syahid tetap eksis, bahkan berkembang menjadi satu-satunya sekolah swasta paling baik di Sampang, tidak bisa dilepaskan dari dukungan dana yang berasal dari bisnis jual beli emas milik keluarga K.H. Fachrur Rozy.

Meskipun SMP Islam Darus Syahid belum memiliki lembaga semacam Komite Sekolah, peneliti tetap memperoleh pelajaran menarik bagi pengembangan partisipasi, justru dari sosok pendirinya, K.H. Fachrur Rozy. Semula peneliti ragu jika di Sampang terhadap sekolah swasta di bawah naungan Depdiknas, apalagi memiliki reputasi bagus. Keraguan peneliti segera sirna setelah melakukan penelitian, dan segera berganti dengan rasa kagum setelah mengetahui keunikan dan keunggulan SMP Islam Darus Syahid. Kekuatan SMP Islam Darus Syahid terletak pada pendiriannya yang memiliki visi mewujudkan lembaga pendidikan yang berkeunggulan dalam bidang pendidikan umum dan pendidikan agama. Berikut penuturan K.H. Fachrur Rozy:

“Kemauan saya tidak muluk-muluk. Saya hanya ingin melahirkan kader-kader bangsa yang intelek tapi bermoral. Berakhlakul karimah. Manusia yang ‘*anfa linna*, manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Otomatis membutuhkan intelektualitas yang cukup, tetapi juga kokoh dalam

pendidikan agama. Yang dibutuhkan oleh bangsa sekarang adalah manusia seperti itu. Konsep saya berangkat dari konsep, tegak dan runtuhnya suatu bangsa tergantung pada akhlak dan moral yang dimiliki oleh suatu bangsa tersebut. Manakala akhlak suatu bangsa tersebut bagus, maka tegaklah bangsa itu. Tetapi kalau akhlak atau moral bangsa bejat, maka runtuhlah bangsa itu. Sederhana sekali! Saya melihat pada perkembangan zaman. Seperti dikatakan nabi, Ibnu Abi Salaf: *alilmu auladakumbi ilmiz zaman*. Zaman kita menuntut model – model seperti itu. Lalu bagaimana dengan khazanah pesantren yang salaf? Ada pad nilai yang didukung oleh kajian kitab. Jadi nuansa salaf masih saya pertahankan. Jadi pengajian kitab masih saya pertahankan seperti Safin, Bafadal, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Tafsir Jalalain. Dengan begitu mereka tidak terputus dengan tradisi salaf. Saya berpegang prinsip *al muhafadzah ala salafus salih wal akhdu bil jadidil aslah*. Tetap saya pegang. Sepanjang hal – hal yang baru itu lebih baik, memberikan kontribusi yang plus terhadap salaf saya ambil. Jadi kita tidak eksklusif, tetapi kita inklusif. Dan kita tidak ingin membentuk islam yang formalis. Tetapi yang substantialis. Islam kan bukan agama yang eksklusif – non formalis, tetapi yang substantialis. Islam punya bentuk, tidak? Apa islam itu arab? Apa islam india. Islam kan tidak punya bentuk. Islam sering dianalogikan dengan jubah, surban, saya tidak mau. Jadi substantis Islam yang kita tanamkan. Jadi Islam masi sikap, prilaku, aqidah, keilmuan, fikiran, itu yang perlu kita transformasikan. Saya ke sana. Konsep saya kesana. Konsep ini terumuskan dalam bentuk kurikulum. Nilai salaf saya pakai, nilai modern saya pakai. Dengan begitu di sini disamping diajarkan kitab – kitab salaf, juga diajarkan ilmu – ilmu

umum. Sehingga kalau diajak matematika nyambung. Diajak fisika juga nyambung. Diajak baca kitab, mari, walau tidak seahli orang yang memang mengambil spesifikasi salaf. Karena kita memang bukan spesialis salaf tapi, paling tidak mereka tahu, pernah mengaji *Fathul Mu'in* pernah mengaji *Fathul Qarib* paling tidak mereka bisa mentransformasi nilai yang terdapat dalam kitab dalam dirinya. Minimal dalam cara berfikir, sikap dan prilaku dengan adopsi pemikiran yang modern, fleksibel, dan lain sebagainya. Dari inilah kita akan mencetak cikal bakal anak bangsa seorang muslim yang tidak hanya bersikap eksklusif – formalistik, melainkan juga inklusif – substantialis. Sekarang ini, ulama tidak hanya di tuntut bicara dharaba zaidun. Ulama juga di tuntut bicara ekonomi. Ulama jua di tuntut bicara politik. Ulama dituntut bisa bicara tetang masa depan degara, dan lain sebagainya”

Dengan visi tersebut, SMP Islam Darus Syahid tampil menjadi lembaga pendidikan yang mensintesis antara pola pendidikan pesantren dengan pola pendidikan umum. Di siang hari murid – murid belajar pendidikan umum, sedangkan di malam hari belajar ilmu – ilmu agama. Dengan sistem pembelajaran lainnya yang dimiliki oleh SMP Islam Darus Syahid adalah pengajaran bahasa Arab. Pada muris (santri) SMP Islam Darus Syahid dikembangkan keterampilan dalam berbahasa Arab. Dengan begitu pendidikan di SMP Islam Darus Syahid bukan lembaga pendidikan asal – asalan. SMP Islam Darus Syahid lahir dengan suatu komitmen melahirkan – meminjam ungkapan K.H. Fachrur Rozy – anak bangsa yang berkeunggulan dalam bidang ilmu – ilmu agama dan ilmu – ilmu umum.

Sosok K.H Fachrur Rozy, sebagai pemilik dari pendiri SMP Islam Darus Syahid, merupakan sosok yang menarik dipelajari

dalam mencari model partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh K.H. Fachrur Rozy dapat dikategorikan sebagai *community-based education* karena memenuhi dua elemen penting seperti dikemukakan Watson (Umberto Sihombing, 2001), yaitu: *pertama*, mementingkan warga belajar. Ada cerita dari K.H. Fachrur Rozy bahwa inisiatif pendirian SMP Islam Darus Syahid, yang kemudian di berinama – setelah konsultasi dengan inisiatif dengan beberapa kyai – SMP Islam Darus Syahid, bukan dari dirinya, melainkan atas inisiatif dari santri yang mondok di pesantren. Semula K.H. Fachrur Rozy malah menginginkan MTs. Dan pola MTs ini berjalan dalam beberapa bulan. Tetapi kemudian diubah menjadi SMP. Gagasan ini berasal dari para satrinya dengan pertimbangan mereka telah memiliki keunggulan dalam bidang agama, sementara pada sisi ilmu-ilmu umum mereka merasa kekurangan. Atas inisiatif para santri (warga belajar) maka MTs diganti menjadi SMP. Kedua, program dimulai dari perspektif kritis. Watson menyebut paling tidak tiga perspektif dalam pendidikan, yaitu: konservatif, liberal, dan kritis. Menurut Watson. Pendidikan berbasis masyarakat menggunakan pendekatan kritis yang menekankan pentingnya perbaikan kemampuan dasar masyarakat, meningkatkan kemampuan yang sudah ada, dan partisipasi dalam setiap kegiatan. Di muka telah dikemukakan, lahirnya SMP Islam Darus Syahid antara lain didasari oleh ketidakpuasaan terhadap kondisi pendidikan dan pertimbangan terhadap krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia yang bersumber dari krisis moral atau akhlak. Sikap kritis pada praktik pendidikan di Indonesia dan kritis yang dialami oleh bangsa Indonesia mendasari pemikiran pengelola lembaga ini untuk mengembangkan kurikulum yang memiliki keunggulan pada dua bidang keilmuan: umum dan agama.

Seluruh upaya yang telah dirintis oleh K.H. Fachrur Rozy sehingga melahirkan

sekolah swasta yang memiliki keunikan dan mampu bersaing, merupakan salah satu perwujudan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Jika ditempatkan dalam perspektif teoritik dari Dean Nielsen, partisipasi yang dikembangkan oleh K.H. Fachrur Rozy dapat dikategorikan sebagai partisipasi yang berbentuk “kepemilikan penuh” (*full ownership*) karena program pendidikan dikendalikan secara mandiri baik oleh K.H. Fachrur Rozy maupun para guru di SMP Islam Darus Syahid. Ada cerita menarik dari Zainal Fatah, kepala sekolah SMP Islam Darus Syahid, dalam merancang kurikulum. Meskipun sekolah ini menggunakan pola SMP, tidak semua kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah diadopsi begitu saja. Misalnya pendidikan jasmani dan kesenian. Dua mata pelajaran ini tidak diberikan secara formal seperti yang dilakukan sekolah-sekolah lainnya. Pendidikan jasmani diintegrasikan dalam kegiatan senam yang dilakukan setiap pagi. Sedangkan pendidikan kesenian diintegrasikan dengan kegiatan keagamaan seperti pembacaan barzanji, terbang jidor, pembacaan shalawat, dan lain sebagainya. Dalam pandangan Zainal Fatah, kegiatan ini bisa dikategorikan sebagai pendidikan kesenian. Yang menarik, jam untuk pendidikan jasmani dan kesenian itu dipakai untuk memberikan pelajaran yang berorientasi pada pengembangan keterampilan berbahasa (Arab dan Inggris) dan keterampilan keagamaan lainnya.

Tentu, partisipasi yang dirintis oleh K.H. Fachrur Rozy tidak muncul begitu saja. Ada kekuatan yang mendorong K.H. Fachrur Rozy dalam mengembangkan pendidikan, yaitu komitmen, visi, misi, dan keprihatinan terhadap kondisi pendidikan, kondisi bangsa, dan kondisi umat Islam. Inilah yang disebut dengan *basic values* yang mendasari K.H. Fachrur Rozy dalam mengembangkan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari paparan di muka, akhirnya peneliti sampai pada suatu kesimpulan, kyai sebagai salah satu pranata sosial terpenting di Sampang memiliki potensi dalam mengembangkan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan pengamatan di SMPN 3 dan SMP Islam Darus Syahid. Pada kasus partisipasi di SMPN 3, kyai sebagaimana diperankan oleh K.H. Mu'tasin, maupun memerankan dirinya sebagai motivator bagi orang tua. Peran yang dilakukan oleh K.H. Mu'tasin diakui oleh pihak sekolah dan anggota Komite Sekolah mampu menggugah kesadaran orangtua berpartisipasi terhadap kegiatan sekolah meskipun terkendala oleh keterbatasan dari sisi ekonomi. Hal yang menarik adalah pendekatan yang digunakan oleh K.H. Mu'tasin untuk menggugah kesadaran orang tua, yakni pendekatan keagamaan. Pendekatan K.H. Mu'tasin ini patut diberi apresiasi karena memiliki relevansi dengan kondisi sosial budaya orang tua. Orang Sampang, sebagaimana halnya orang Madura pada umumnya, memiliki karakter sosial budaya yang khas. Mereka memiliki kepekaan terhadap simbol-simbol keagamaan terutama yang bersumber dari kyai. Maka bisa dimaklumi jika orang tua murid SMPN 3 merasa tergugah untuk berpartisipasi terhadap sekolah setelah dimotivasi oleh K.H. Mu'tasin.

Selain sosok K.H. Mu'tasin yang berperan cukup penting dalam pengembangan partisipasi di tingkat sekolah, di Sampang terdapat sosok kyai lainnya yang patut di apresiasi karena mampu merintis model partisipasi pendidikan, yakni K.H. Fachrur Rozy. Kyai alumni Pondok Pesantren Modern Gontor ini, maupun mengembangkan model "pendidikan alternatif" yang memiliki keunikan dan perbedaan jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya di Sampang. Model pendidikan yang dikembangkan oleh K.H. Fachrur Rozy

merupakan sintesis antara pendidikan umum dengan pendidikan agama sehingga murid (santri) SMP Islam Darus Syahid memiliki keunggulan di kedua bidang keilmuan tersebut. Upaya yang dirintis oleh K.H. Fachrur Rozy menjadi contoh kemandirian masyarakat dalam mengembangkan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berg, Bruce L. (2007) *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Boston: Pearson.
- Culla, Adi Suryadi (2006) *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Creswell, John W. (1994) *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*, London: Sage Publications.
- Diamond, Larry (1994) "Civil Society and the Development of Democracy" *Journal of Democracy*, Vol. 5, No. 3, July.
- Faisal, Sanapiah, dkk. (2007) *Partisipasi Masyarakat terhadap Sekolah*, Malang: Universitas Negeri Malang.
- Gaffar, Affan (1999) *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gunawan, Asep dan Nurjulianti, Dewi (ed.) (1999) *Gerakan Keagamaan dalam Penguatan Civil Society: Analisis Perbandingan Visi dan Misi LSM dan Ormas Berbasis Keagamaan*, Jakarta: LSAF.
- Hikam, Muhammad AS (1996) *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.

- Idris, Jamaluddin (2005) *Analisis Kritis Mutu Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Ade, dkk. (2004) *Mendagangkan Sekolah: Studi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Manan, Munafrizal (2005) *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, Yogyakarta: Resist Book.
- Nugroho, Riant (2008) *Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi, dan Strategi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant (2008) *Kebijakan Pendidikan yang Unggul: Kasus Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Jembrana-2006*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nyman, Mikaela (2006) *Democratising Indonesia: The Challenge of Civil Society in the era of Reformasi*, Denmark: Nias Press.
- Rasyid, M. Ryass (1997) "Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan", *Jurnal Ilmu Politik* No. 17, Jakarta: AIPI dan Gramedia.
- Schutt, Russell K. (2006) *Investigating the Social World: The Proccess and Practice of Research*, London: Sage Publications.
- Surbakti, Ramlan (1997) "Ditsospol dan Pembentukan Civil Society". Dalam I. Bambang Susilo (ed.), *Masyarakat & Negara: Kado untuk Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Tilaar, H.A.R. (1992) *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Bandung: Rosda Karya.
- Tilaar, H.A.R. (1995) *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional, 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan*, Jakarta: Grasindo.
- Tilaar, H.A.R. (1998) *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Tera Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. (2003) *Kekuasaan & Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Magelang: Tera Indonesia.
- Tilaar, H.A.R. dan Nigroho, Riant (2008) *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.